

ANALISIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN LABORATORIUM KESEHATAN DI DESA ULANTA, KECAMATAN SUWAWA, KABUPATEN BONE BOLANGO

Agus Pariono¹, Witri Aulya Rachman², Nadadhya Aura Nazywa Moha³, Dwi
Syafiq Ahmad Zaenal⁴, Atika Nur Fitri Sondong⁵

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo
guspri811@gmail.com¹, witirachman950@gmail.com², auramoha1@gmail.com³,
dwisyafigahmadzaenal@gmail.com⁴, atikasondong@gmail.com⁵

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur kesehatan merupakan prioritas strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di daerah, termasuk di Kabupaten Bone Bolango. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang berlokasi di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, dengan fokus pada tahapan implementasi, tantangan administratif, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus berbasis data sekunder dari laporan media dan instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proyek Labkesda mendapat dukungan dari DPRD dan Kejaksaan Negeri Bone Bolango, pelaksanaannya menghadapi kendala berupa keterlambatan progres fisik dan deviasi terhadap rencana awal. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem administrasi pembangunan, manajemen proyek, serta transparansi pengawasan agar proyek dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan kesehatan berkelanjutan.

Kata Kunci: Administrasi Pembangunan, Infrastruktur Kesehatan, Laboratorium Kesehatan Daerah, Bone Bolango, Manajemen Proyek.

ABSTRACT

Health infrastructure development is a strategic priority to improve the quality of public services, including in Bone Bolango Regency. This article aims to analyze the implementation of the development administration for the Regional Health Laboratory (Labkesda) located in Ulanta Village, Suwawa District, focusing on stages, administrative challenges, and oversight mechanisms. The study employs a qualitative descriptive method with a case study approach based on secondary data from local media and official government documents. The results indicate that despite strong supervision from the Regional House of Representatives (DPRD) and legal assistance from the District Attorney's Office, the project faced significant obstacles such as construction delays and deviations from the initial plan. These findings highlight the importance of strengthening development administration systems, project management, and transparency to ensure optimal public benefits and sustainable health infrastructure development.

Keywords: Development Administration, Health Infrastructure, Regional Health Laboratory, Bone Bolango, Project Management.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur kesehatan merupakan elemen penting dalam agenda pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat

(Pane dkk., 2020; Kalalo dkk., 2024). Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan publik, termasuk fasilitas kesehatan (Kusuma Nigrum, 2023; Nairobi & Respitarsi, 2021). Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu daerah yang menjadikan penguatan sektor kesehatan sebagai prioritas utama, dengan membangun Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa. Proyek ini menjadi simbol transformasi pelayanan kesehatan menuju sistem yang lebih responsif dan terintegrasi.

Pemilihan Desa Ulanta sebagai lokasi proyek bukan tanpa alasan. Secara geografis, wilayah ini termasuk dalam kawasan strategis provinsi dengan potensi pengembangan kawasan Agropolitan dan Industri Terpadu. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041, Desa Ulanta diproyeksikan sebagai pusat kegiatan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan dan perbatasan. Oleh karena itu, pembangunan Labkesda di kawasan ini memiliki nilai strategis ganda: memperluas akses kesehatan sekaligus mendukung pemerataan pembangunan wilayah (Luthfi, 2024).

Namun, pada tataran implementasi, pelaksanaan proyek pembangunan Labkesda tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan jadwal dan target yang direncanakan. Berdasarkan laporan media dan hasil monitoring lembaga pengawas, ditemukan adanya deviasi progres fisik serta keterlambatan pekerjaan yang signifikan (Nurpita & Khoirudin, 2023; Arofah, 2021; Jahira Fajri Madani dkk., 2022). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait efektivitas administrasi pembangunan dalam mengelola proyek publik, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Administrasi pembangunan pada dasarnya merupakan sistem manajemen pemerintahan yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pembangunan secara komprehensif. Menurut Siagian (dalam Setiawan, 2019), efektivitas administrasi pembangunan bergantung pada sinergi antara aspek perencanaan kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat (Wulandari & Tulis, 2022). Dalam konteks proyek Labkesda, administrasi pembangunan tidak hanya berfungsi teknokratis, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran publik (Saprianto dkk., 2023).

Fenomena keterlambatan proyek ini menjadi refleksi bahwa implementasi administrasi pembangunan di tingkat daerah masih menghadapi tantangan klasik berupa kurangnya koordinasi, lemahnya pengawasan internal, serta minimnya partisipasi publik dalam proses evaluasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh tata kelola administratif yang adaptif terhadap dinamika sosial dan birokrasi lokal.

Penelitian ini penting karena memberikan perspektif kritis terhadap bagaimana kebijakan pembangunan kesehatan diterjemahkan dalam praktik birokrasi di lapangan (Katili dkk., 2025; Mokodongan dkk., 2025). Dengan menganalisis proses pembangunan Labkesda di Desa Ulanta, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi pola-pola administratif yang menghambat efektivitas proyek publik sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan yang realistis.

Lebih jauh lagi, studi ini menyoroti pentingnya pengawasan kolaboratif antara lembaga legislatif (DPRD), eksekutif (pemerintah daerah), dan yudikatif (kejaksaan) sebagai bentuk penerapan prinsip check and balance dalam administrasi publik (Mokodongan, Van Gobel, dkk., 2025; Mokodongan, Masaguni, dkk., 2025). Melalui koordinasi antaraktor ini, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pembangunan dalam proyek Labkesda di Desa Ulanta, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan publik dalam mendukung tata kelola pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan konsep administrasi pembangunan yang kontekstual dan aplikatif di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara faktual dan sistematis pelaksanaan administrasi pembangunan dalam proyek Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa (Creswell & Guetterman, 2025; Johnson & Christensen, 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah dinamika administratif dari perspektif kebijakan publik tanpa melakukan intervensi langsung terhadap objek penelitian. Fokus utama diarahkan pada analisis dokumen, pemberitaan daring, serta laporan resmi dari lembaga pengawas pemerintah seperti DPRD dan Kejaksaan Negeri Bone Bolango yang terlibat dalam proses pengawasan proyek (Haq & Yasin, 2025; Pandey, ' 2025).

Sumber data penelitian berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi. Data utama mencakup dokumen publik seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), laporan kegiatan pengawasan DPRD dan Kejaksaan, serta berita resmi media lokal mengenai perkembangan pembangunan Labkesda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri publikasi pemerintah dan media terpercaya untuk mengidentifikasi fakta administratif, kebijakan, serta peran aktor-aktor yang berpengaruh dalam implementasi proyek pembangunan tersebut.

Analisis data dilakukan secara deskriptif tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data digunakan untuk menyeleksi

informasi relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian dilakukan dalam bentuk narasi analitis dan tabel sintesis untuk memperjelas hubungan antara teori dan temuan lapangan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari dokumen pemerintah, laporan lembaga pengawas, dan literatur akademik tentang administrasi pembangunan (Miles & Huberman, 1994; Parjaman & Akhmad, 2019). Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menyoroti hasil fisik pembangunan, tetapi lebih pada efektivitas tata kelola administratif dan implikasinya terhadap kebijakan publik di tingkat daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Proyek Labkesda

Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Desa Ulanta merupakan bagian dari kebijakan strategis Kabupaten Bone Bolango untuk memperkuat infrastruktur kesehatan masyarakat. Proyek ini didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen publik, proyek ini memiliki tujuan utama menyediakan fasilitas pemeriksaan laboratorium terpadu yang mampu mendukung pelayanan medis dan surveilans penyakit di wilayah perdesaan. Secara administratif, proyek ini dirancang mengikuti prinsip *good governance*, dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang diatur dalam dokumen perencanaan daerah.

Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan penyusunan kebutuhan teknis dan administrasi proyek yang mengacu pada *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Bone Bolango*. Lokasi Desa Ulanta dipilih karena strategis secara geografis dan berada dalam kawasan Agropolitan serta Industri Terpadu yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Pemilihan ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi pembangunan yang menekankan pemerataan fasilitas publik antarwilayah. Namun, pada praktiknya, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan masih terbatas, sehingga proses pengambilan keputusan lebih bersifat *top-down*.

Tahap pelaksanaan proyek memperlihatkan dinamika administratif yang kompleks. Berdasarkan data lapangan dari media dan laporan DPRD, pelaksanaan fisik proyek mengalami keterlambatan signifikan dari jadwal yang telah ditetapkan dalam *baseline schedule*. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan birokratis dan realitas di lapangan. Faktor-faktor seperti hambatan logistik, keterbatasan tenaga teknis, serta perubahan kondisi cuaca di wilayah Suwawa turut memengaruhi efisiensi pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun dokumen administratif disusun dengan baik, pengendalian operasional di tingkat proyek belum berjalan optimal.

Keterlambatan pelaksanaan berdampak pada penurunan kepercayaan publik

terhadap efektivitas pembangunan daerah. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait serapan anggaran, karena keterlambatan progres dapat berimplikasi pada efisiensi penggunaan dana DAK. Dalam teori administrasi pembangunan, situasi seperti ini mencerminkan lemahnya fungsi *controlling* dalam siklus manajemen pembangunan publik. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya mengandalkan instrumen birokrasi, tetapi juga menerapkan sistem manajemen proyek berbasis kinerja (*performance-based project management*) agar penyimpangan jadwal dapat diminimalisasi.

Dalam konteks pengawasan, keterlibatan lembaga eksternal menjadi aspek penting dalam memastikan transparansi pelaksanaan proyek. DPRD Bone Bolango melalui Komisi II dan III melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pada Oktober 2025, sementara Kejaksaan Negeri Bone Bolango turut mengawasi melalui pendampingan hukum proyek pemerintah daerah. Kolaborasi dua lembaga ini menggambarkan pelaksanaan prinsip *check and balance* dalam tata kelola pembangunan publik. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mencegah penyimpangan anggaran, tetapi juga menjadi sarana pembinaan terhadap pelaksana proyek.

Hasil evaluasi lapangan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bone Bolango pada *Show Cause Meeting* (SCM) kedua mengungkapkan adanya deviasi progres yang cukup signifikan dari target fisik awal. Kondisi ini kemudian mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan langkah korektif, seperti percepatan pekerjaan dan penyesuaian jadwal kontrak. Meskipun tindakan ini bersifat reaktif, hal tersebut menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan dapat mendorong respons administratif yang cepat dalam menghadapi kendala implementasi di lapangan.

Keterlambatan proyek ini juga dapat dipahami dalam konteks keterbatasan kapasitas birokrasi lokal. Soedarto dkk., (2023) menyebut bahwa efektivitas pembangunan di negara berkembang sering terkendala oleh lemahnya kapasitas teknis, koordinasi antarinstansi, dan sistem insentif bagi pelaksana proyek publik. Hal ini tampak jelas dalam kasus pembangunan Labkesda, di mana perencanaan strategis belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan operasional di tingkat implementasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan administrasi pembangunan proyek Labkesda memperlihatkan adanya kesenjangan antara *policy design* dan *policy implementation* (Holqi & Salam, 2024; Wang & Ran, 2023). Pada sisi lain, proyek ini juga menjadi ajang pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pembangunan di masa mendatang. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat antarinstansi teknis serta peningkatan kapasitas manajerial agar pelaksanaan proyek publik dapat berjalan efektif dan berorientasi hasil.

Persepsi Masyarakat dan Pengawasan Publik

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Labkesda Desa Ulanta menjadi dimensi penting dalam analisis administrasi pembangunan. Berdasarkan laporan media

lokal dan hasil wawancara dengan masyarakat yang dikutip dalam pemberitaan resmi, proyek ini secara umum disambut positif. Masyarakat menilai kehadiran laboratorium kesehatan akan mempermudah akses pemeriksaan medis dan mendukung program kesehatan berbasis komunitas. Namun, keterlambatan pelaksanaan menimbulkan kekhawatiran bahwa manfaat proyek belum dapat segera dirasakan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara persepsi publik dan efektivitas administrasi pembangunan daerah.

Persepsi masyarakat terhadap proyek ini sebagian besar ditentukan oleh sejauh mana transparansi informasi pemerintah daerah dalam menyampaikan progres pembangunan. Ketika pelaksanaan proyek tidak sesuai target, muncul ketidakpastian di kalangan warga tentang waktu penyelesaian dan manfaat langsung yang akan diterima. Dalam perspektif administrasi publik, hal ini berkaitan dengan prinsip *responsiveness* dan *accountability* pemerintah terhadap publik. Transparansi informasi menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan sosial terhadap kebijakan pembangunan.

DPRD Bone Bolango memegang peran penting dalam menjembatani persepsi masyarakat dan realitas birokrasi. Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan representasi publik. Kunjungan lapangan yang dilakukan pada Oktober 2025 merupakan bentuk konkret dari pengawasan representatif yang menampung aspirasi masyarakat sekaligus menekan pelaksana proyek agar segera menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Tindakan ini memperlihatkan bahwa fungsi legislasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam menjaga akuntabilitas proyek publik.

Selain DPRD, Kejaksaan Negeri Bone Bolango turut menjalankan fungsi pengawasan hukum terhadap pelaksanaan proyek melalui program pendampingan hukum (*legal assistance for development projects*). Kegiatan ini mencerminkan penerapan asas *preventive justice* dalam administrasi pembangunan, di mana lembaga yudikatif tidak hanya bertugas menindak pelanggaran hukum, tetapi juga mencegah potensi penyimpangan sejak tahap pelaksanaan proyek. Keterlibatan ini memperkuat sinergi kelembagaan dan menegaskan pentingnya kolaborasi antaraktor dalam pembangunan daerah.

Dari sisi sosial, keterlambatan proyek menimbulkan efek psikologis pada masyarakat. Beberapa warga menganggap bahwa proyek publik seringkali hanya bersifat seremonial dan lambat terealisasi. Artinya keberhasilan pembangunan publik tidak hanya diukur dari hasil fisik, tetapi juga dari legitimasi sosial yang dibangun melalui kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap keterlambatan atau deviasi proyek perlu dikelola melalui komunikasi publik yang terbuka dan akuntabel.

Kehadiran pengawasan publik yang terintegrasi dapat meminimalisasi kesenjangan

antara ekspektasi masyarakat dan kinerja birokrasi. Dalam kasus Labkesda, pengawasan publik dilakukan secara formal oleh DPRD dan Kejaksaan, serta secara informal melalui pemantauan media lokal dan media sosial masyarakat. Pengawasan ganda ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memperkuat prinsip keterbukaan dan mendorong perbaikan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam konteks administrasi pembangunan, persepsi masyarakat berperan sebagai indikator keberhasilan proses kebijakan. Ketika publik merasa terlibat dan mendapatkan informasi yang jelas, maka partisipasi dan dukungan terhadap program pembangunan meningkat. Sebaliknya, jika proses pembangunan dianggap tidak transparan, maka kepercayaan sosial dapat menurun. Karena itu, integrasi antara pengawasan formal dan partisipasi publik perlu dijadikan strategi dalam tata kelola pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Akhirnya, persepsi masyarakat terhadap proyek Labkesda mencerminkan kualitas hubungan antara pemerintah dan warga. Pemerintah daerah yang adaptif terhadap kritik dan aspirasi publik akan lebih mudah mewujudkan pembangunan yang efektif dan berdaya guna. Dalam konteks Bone Bolango, proyek ini menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya administrasi pembangunan yang kolaboratif, di mana setiap aktor baik pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat memiliki tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan pembangunan.

Analisis Tematik Administrasi Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan Labkesda Desa Ulanta dapat dianalisis menggunakan empat fungsi utama administrasi pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Keempat fungsi ini merupakan satu kesatuan yang menentukan keberhasilan proyek publik. Berdasarkan hasil telaah dokumen dan data sekunder, setiap fungsi memiliki dinamika tersendiri yang saling memengaruhi, baik dari sisi kelembagaan maupun hasil implementasi.

Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah telah mengintegrasikan proyek Labkesda ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan RTRW Kabupaten Bone Bolango. Ini menunjukkan kesesuaian antara perencanaan sektoral dan tata ruang wilayah. Namun, pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam tahap ini masih terbatas, sehingga pendekatan pembangunan lebih bersifat birokratis dibanding partisipatif. Menurut (Setiawan, 2019), perencanaan pembangunan yang ideal harus menggabungkan dimensi teknokratis dan sosial agar hasilnya relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Tahap pelaksanaan proyek memperlihatkan bahwa efektivitas administrasi pembangunan sangat ditentukan oleh koordinasi antarinstansi. Deviasi progres yang terjadi menunjukkan bahwa pengawasan internal belum berjalan optimal. Dalam hal ini, penguatan kapasitas manajemen proyek menjadi keharusan agar penyimpanan teknis

dapat segera diidentifikasi dan dikoreksi. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2019), koordinasi lintas sektor merupakan inti dari implementasi kebijakan publik yang efektif di tingkat daerah.

Fungsi pengawasan dalam proyek Labkesda dijalankan oleh lembaga legislatif dan yudikatif melalui mekanisme formal. DPRD berperan memastikan penggunaan anggaran sesuai regulasi, sedangkan Kejaksaan Negeri melakukan pendampingan hukum untuk menjamin kepatuhan terhadap prosedur. Meskipun kedua lembaga ini telah aktif, sistem pengawasan masih bersifat reaktif dan belum berbasis kinerja (*performance-based monitoring*). Hal ini menyebabkan respon terhadap masalah di lapangan sering terlambat dan bersifat kuratif, bukan preventif.

Fungsi evaluasi proyek dilakukan melalui rapat koordinasi dan *Show Cause Meeting* (SCM) antara Dinas Kesehatan, Kejaksaan, dan pihak kontraktor. Evaluasi ini berfungsi menilai progres pekerjaan sekaligus merumuskan langkah percepatan. Namun, sistem evaluasi belum sepenuhnya berbasis hasil (*outcome-based evaluation*), karena masih menitikberatkan pada aspek administratif dan fisik. Padahal, menurut UNDP (2021), evaluasi berbasis hasil sangat penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat sosial dari proyek pembangunan publik. Tabel berikut menyajikan sintesis hubungan antara fungsi administrasi pembangunan dan temuan empiris di lapangan:

Tabel 1. Sintesis Hubungan Antara Fungsi Administrasi Pembangunan Dan Temuan Empiris

Fungsi Administrasi Pembangunan	Implementasi di Lapangan	Temuan Empiris	Implikasi Administratif
Perencanaan	Berbasis RTRW dan kebutuhan daerah	Minim partisipasi masyarakat	Perlu forum konsultasi publik
Pelaksanaan	Melalui kontraktor dan DAK	Terjadi deviasi waktu	Perlu penguatan manajemen proyek
Pengawasan	DPRD dan Kejaksaan aktif	Bersifat reaktif	Diperlukan sistem pelaporan digital
Evaluasi	SCM dan rapat koordinasi	Berorientasi administratif	Diperlukan evaluasi berbasis hasil

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa administrasi pembangunan proyek Labkesda telah dijalankan secara formal sesuai prosedur, namun efektivitasnya masih terbatas oleh faktor koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan, diperlukan reformasi tata kelola administratif yang menekankan integrasi lintas sektor, transparansi, dan inovasi digital dalam pengawasan proyek publik.

Secara keseluruhan, proyek pembangunan Labkesda menjadi refleksi konkret dari dinamika administrasi pembangunan di tingkat daerah. Keberhasilan proyek ini bukan hanya diukur dari penyelesaian fisik infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana sistem administrasi mampu menjamin efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan memperkuat empat fungsi utama administrasi pembangunan, pemerintah daerah

dapat menciptakan model tata kelola pembangunan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pelaksanaan pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Desa Ulanta mencerminkan dinamika administrasi pembangunan daerah yang kompleks. Secara konseptual, proyek ini telah dirancang sesuai prinsip *good governance* melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan desain kebijakan. Deviasi progres fisik, keterlambatan jadwal, serta lemahnya koordinasi antarinstansi menandakan masih adanya kesenjangan antara perencanaan administratif dan realisasi teknis di lapangan.

Dari perspektif administrasi pembangunan, keberhasilan suatu proyek publik tidak hanya bergantung pada ketepatan prosedur, tetapi juga pada kapasitas birokrasi dalam mengelola dinamika pelaksanaan. Keterlibatan DPRD dan Kejaksaan Negeri Bone Bolango menunjukkan upaya konkret dalam menegakkan akuntabilitas publik. Namun, pengawasan yang bersifat reaktif dan belum berbasis kinerja (*performance-based monitoring*) mengakibatkan langkah korektif sering dilakukan setelah kendala muncul. Kondisi ini menegaskan perlunya inovasi dalam sistem pengawasan pembangunan yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi hasil.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang belum optimal. Proyek Labkesda sejatinya berorientasi pada peningkatan layanan kesehatan masyarakat, tetapi rendahnya pelibatan publik sejak tahap perencanaan menyebabkan munculnya jarak antara pemerintah dan warga. Keberhasilan administrasi pembangunan akan lebih kuat apabila dibangun atas dasar kolaborasi antara aktor pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat penerima manfaat. Transparansi informasi publik serta komunikasi dua arah perlu diperkuat agar legitimasi sosial terhadap proyek publik dapat meningkat.

Analisis tematik menunjukkan bahwa empat fungsi administrasi pembangunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi telah dijalankan secara formal, namun masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan. Reformasi administratif perlu diarahkan pada pembentukan sistem koordinasi lintas sektor yang jelas, peningkatan kemampuan teknis pelaksana proyek, serta penerapan evaluasi berbasis hasil (*outcome-based evaluation*). Langkah ini bahwa tata kelola pembangunan yang berkelanjutan harus menekankan sinergi antarlembaga dan keterlibatan publik.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan administrasi pembangunan merupakan kunci utama bagi keberhasilan proyek Labkesda di Desa Ulanta. Pemerintah daerah perlu menjadikan pengalaman proyek ini sebagai pelajaran kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi, transparansi penggunaan anggaran, serta efektivitas implementasi pembangunan di masa mendatang. Jika

keempat fungsi administrasi pembangunan dapat dijalankan secara integratif dan akuntabel, maka proyek serupa tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik yang bermanfaat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arofah, N. S. F. (2021). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 3(2), 265–278. <https://doi.org/10.17509/jpei.v3i2.31443>
- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2025). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (Seventh edition). Pearson Education.
- Haq, M., & Yasin, N. (2025). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methodology Paradigms. *Journal of Practical Studies in Education*, 6(6), 15–29. <https://doi.org/10.46809/jpse.v6i6.144>
- Holqi, F. G. F., & Salam, A. (2024). Collaborative Governance Sebagai Alternatif Pemerintah Daerah dan Perseroan Dalam Mengatasi Permasalahan Sektor Pertambangan: Studi Program TJSL Tambang Galian C PT. AMS di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 78–87. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3665>
- Jahira Fajri Madani, Putri Andini Novianti, Rhaina Al Yasin, & Marina Ery Setiyawati. (2022). Studi Literatur Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Efektivitas Pekerjaan Terhadap Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 1(4), 187–197. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v1i4.714>
- Johnson, B., & Christensen, L. B. (2020). *Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches* (Seventh edition). SAGE.
- Kalalo, R. R., Simatupang, S., Simatupang, M. M. M., Muktar, M., & Arif, M. (2024). The Urgency of Providing Health Infrastructure in Improving the Quality of Life and Creating a Golden Generation in 2045 in Villages. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(3), 198–205. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i3.911>
- Katili, A. Y., Arifin, R., & Mokodongan, R. (2025). Governance Capacity Dan Kerentanan Lingkungan Perkotaan: Analisis Peran Birokrasi Dalam Pengelolaan Banjir Dan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bugis. *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 4(3), 110–123.
- Kusuma Nigrum, D. A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Belanja Bidang Kesehatan terhadap Pertumbuhan PDRB Perkapita di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 698–706. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.625>

- Luthfi, M. I. (2024). Identifikasi Pengaruh Infrastruktur Publik Dan Ketimpangan Pendapatan Per Kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sumbagsel Tahun 2013-2022. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 3(2), 235–242.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Mokodongan, R., Katili, A. Y., Djaba, M., & Masaguni, O. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hutan di Provinsi Gorontalo: Studi Kasus PSN Bulango Ulu. *Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi*, 1(1), 32–52.
- Mokodongan, R., Masaguni, O. S., Djaba, M., & Katili, A. Y. (2025). Manajemen destinasi wisata berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 4(2), 53–63.
- Mokodongan, R., Van Gobel, L., & Al-Hadar, S. (2025). Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Pemenuhan Predikat Nindya Kota Layak Anak di Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 12(3), 1147–1161.
- Nairobi, N., & Respitari, R. (2021). Public Infrastructure and Economic Growth in the Local Region. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 51–60. <https://doi.org/10.29259/jep.v19i1.13826>
- Nurpita, A., & Khoirudin, R. (2023). The Effect of Infrastructure on Economic Growth in Regencies and Cities in Special Region of Yogyakarta Province. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS*, 11(1), 41–47. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v11i1.4011>
- ‘Pandey,’ M. P. (2025). Innovative research methods in comparative education: Emerging trends and applications. *Discover Education*, 4(1), 210. <https://doi.org/10.1007/s44217-025-00616-1>
- Pane, N., Sembiring, S. D. B., & Unsa, I. (2020). Pengaruh pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di sumatera utara. *Js (Jurnal Sekolah)*, 4(2), 172–182.
- Parjaman, T., & Akhmad, D. (2019). Pendekatan Penelitian Kombinasi: Sebagai “Jalan Tengah” Atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 530–548. <https://doi.org/10.25157/moderat.v5i4.3077>
- Saprianto, R., Simbolon, T. R., & Hukom, A. (2023). Implikasi otonomi daerah pada pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 3(2), 68–84.
- Setiawan, F. (2019). Pengaruh teori pembangunan dunia ke-3 dalam teori modernisasi terhadap administrasi pembangunan di Indonesia. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 8(2), 1–11.



- Soedarto, T., Kagramanto, L. B., & Anggriawan, T. P. (2023). Penguatan Sanksi Administratif Sebagai Perwujudan Perlindungan Lingkungan Guna Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sektor Perkebunan, Pertambangan Dan Kehutanan). *UNES Law Review*, 5(4), 3763–3773. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.692>
- Wang, H., & Ran, B. (2023). Network governance and collaborative governance: A thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. *Public Management Review*, 25(6), 1187–1211. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2011389>
- Wulandari, S., & Tulis, R. S. (2022). Prinsip Manajemen Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Katingan (Studi Di Desa Tumbang Lahang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(2), 148–161.